

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
MELALUI PROGRAM SALIN SWARA DI KOTA BONTANG**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT THROUGH
THE SALIN SWARA PROGRAM IN BONTANG CITY**

Jeanne Steza Ryna Sianturi ^a, Kus Indarto ^{a*}

^a Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman, email: rina17november@gmail.com

^a Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman, email: kus.indarto@fisip.unmul.ac.id

Abstract

Problems: *The volume of waste accumulation in Bontang City increases every year. Therefore PT. Badak LNG initiated the Salin Swara Program in collaboration with the Bontang City Environmental Service and the community which focuses on waste banks. From the observation results, problems were identified that there is still a lack of commitment from the parties in collaboration, there are not yet adequate waste processing facilities, there is a lack of human resources, there are no formal collaboration benchmarks related to targets, and there are still sectoral egos.*

Purpose: *Describe and analyze collaborative governance in waste management through the Salin Swara Program in Bontang City as well as the driving and inhibiting factors in the collaboration process.*

Methodology: *This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques in this research were carried out by observation, interviews, documentation. Interactive model data analysis techniques.*

Results/Findings: *The research results show that the collaboration carried out through the Salin Swara Program in Bontang City is not optimal. There are still shortcomings in four aspects of government collaboration, such as, in terms of institutional design, mutually agreed performance standards in collaboration have not been developed. In terms of the collaboration process, it shows that there is still a lack of intensity of face-to-face dialogue carried out by each party. Lack of commitment from the community, there has not been a mutual understanding between the parties regarding the objectives of the collaboration.*

Paper Type: *Descriptive*

Keywords: *Collaborative Governance, Waste, Program, Salin Swara*

*Corresponding Author
email: kus.indarto@fisip.unmul.ac.id

Abstrak

Masalah: Volume penumpukan sampah di Kota Bontang setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu PT. Badak LNG menginisiasi Program Salin Suara yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dan masyarakat yang berfokus pada bank sampah. Dari hasil observasi teridentifikasi permasalahan bahwa masih kurangnya komitmen para pihak dalam kolaborasi, belum terdapat fasilitas pengolahan sampah yang memadai, kurangnya sumber daya manusia, belum terdapat tolak ukur kerjasama yang formal terkait target, masih terdapat ego sektoral.

Tujuan: Mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan sampah melalui Program Salin Suara di Kota Bontang serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses kolaborasi.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data model interaktif.

Temuan/Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan melalui Program Salin Suara di Kota Bontang belum optimal. Masih terdapat kekurangan dari empat aspek kolaborasi pemerintahan seperti, dari segi desain institusional belum dikembangkannya standar kinerja yang disepakati bersama dalam kolaborasi. dari segi proses kolaborasi menunjukkan bahwa masih kurangnya intensitas dialog tatap muka yang dilakukan oleh setiap pihak. Kurangnya komitmen dari pihak masyarakat, belum terbentuknya pemahaman bersama di antara para pihak terkait dengan tujuan dari kolaborasi.

Jenis penelitian: Deskriptif

Kata kunci: Kolaborasi Pemerintah, Sampah, Program, Salin Suara

A. PENDAHULUAN

Setidaknya berisi 4 hal; urgensi riset, pernyataan riset sebelumnya yang relevan dengan topik guna melihat dinamika topik yang diangkat, masalah (problems) dan manfaat. Hingga saat ini sampah masih menjadi permasalahan lingkungan yang berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan sampah masih terus meningkat, seperti meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah serta meningkatnya aktivitas masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan (Wijaya et al., 2022).

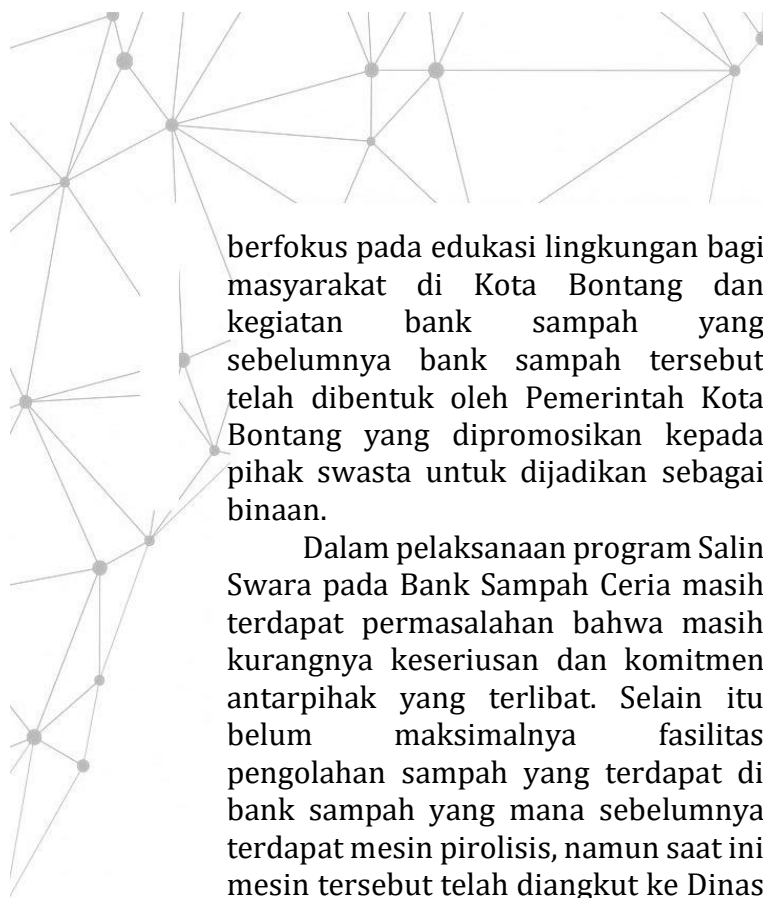
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa persolaan sampah menjadi masalah nasional yang harus dituntaskan. Maka dari itu diperlukan pengelolaan sampah secara hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien (Safitri et al., 2021). Kota Bontang menjadi salah satu kota yang masih menghadapi permasalahan sampah. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bontang setiap tahunnya akan memberikan dampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Volume penumpukan sampah di Kota Bontang cenderung

naik setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) volume sampah di Kota Bontang pada tahun 2019 sebesar 37,122.72 ton, tahun 2020 sebesar 37,769.85 ton, tahun 2021 sebesar 37,894.33 ton, dan pada tahun 2022 volume sampah mencapai 38,046.40 ton. Beberapa sumber sampah yang berkontribusi terhadap volume sampah Kota Bontang antara lain berasal dari rumah tangga/pemukiman, perkantoran/industri, pasar, pusat perniagaan, fasilitas publik, kawasan, dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Meidita Lestari dan Tazkiya Farahnisa (2020) dengan judul Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa Dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu menunjukkan bahwa seiring bertambah tingginya pertumbuhan populasi tumpukan sampah terus meningkat sehingga dibutuhkan keterlibatan dari warga agar tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan. Dalam hal ini dikembangkan cerobong sampah dan bank sampah yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah. Pada proses kolaborasinya menunjukkan bahwa masih kurangnya komitmen sehingga berdampak pada pengurangan sampah yang belum mencapai target yang telah ditentukan serta masih adanya sikap gengsi dari warga sehingga produk bank sampah jarang dilakukan. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata dan Ismail Nurdin (2021) yang berjudul Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa sistem

pengelolaan sampah secara konvensional dengan open dumping di TPA berakibat pada penyusutan daya tampung TPA. Produksi sampah yang meningkat di Kota Tarakan membutuhkan lahan TPA yang lebih luas atau melalui sistem 3R. Sehingga Pemerintah Kota Tarakan membuat program “Semesta” yang melibatkan semua stakeholders. Akan tetapi pada proses kolaborasinya didapatkan masih kurangnya kerjasama antara pemerintah dan swasta akibat perbedaan cara pandang, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta masih kurang fasilitas yang mendukung kolaborasi. Selain itu. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sugiana Desi Safitri, Afifuddin, dan Agus Zainal Abidin (2021) yang berjudul Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) menunjukkan bahwa meningkatnya volume sampah disebabkan oleh tingginya sifat konsumerisme masyarakat sehingga dibutuhkan metode yang tepat dalam pengurangan sampah yaitu dengan program bank sampah. Akan tetapi kurangnya dana operasional menjadi hambatan dalam pengembangan rencana program baru di bank sampah Sejahtera.

Pada penelitian ini, upaya penanganan permasalahan sampah melalui pengelolaan sampah di bank sampah yang dilakukan pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang yang bertanggung jawab pada pengelolaan bank sampah tersebut dan melakukan kolaborasi dengan PT. Badak LNG dalam upaya pengurangan sampah melalui program Salin Swara (Sampah Keliling Swadaya Masyarakat). Program Salin Swara ini



berfokus pada edukasi lingkungan bagi masyarakat di Kota Bontang dan kegiatan bank sampah yang sebelumnya bank sampah tersebut telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Bontang yang dipromosikan kepada pihak swasta untuk dijadikan sebagai binaan.

Dalam pelaksanaan program Salin Suara pada Bank Sampah Ceria masih terdapat permasalahan bahwa masih kurangnya keseriusan dan komitmen antarpihak yang terlibat. Selain itu belum maksimalnya fasilitas pengolahan sampah yang terdapat di bank sampah yang mana sebelumnya terdapat mesin pirolisis, namun saat ini mesin tersebut telah diangkut ke Dinas Lingkungan Hidup sehingga alat yang tersedia di bank sampah antara lain timbangan dan mesin press. Adapun masalah lain yang terindikasi yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah pada bank sampah Ceria yang pada awalnya ada 15 orang saat ini menjadi 13 orang, jumlah sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Satimpo yaitu 6.930 jiwa. Selain itu ditemukan permasalahan bahwa belum adanya tolak ukur kerjasama yang formal mengenai target. Selain itu, adanya ego sektoral dari masing-masing stakeholders menjadi kendala dalam mencari titik tengah permasalahan dalam kolaborasi. Hal tersebut berdampak pada proses penyesuaian komunikasi dan proses penyaluran informasi terkadang tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah melalui Program Salin Suara di Kota Bontang

serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses kolaborasi.

B. TINJAUAN TEORI

1. Governance

Governance merupakan kata ganti dari *government*. Menurut Dwiyanto dalam Astuti (2020:32) mengatakan bahwa *governance* merujuk kepada pentingnya partisipasi dari para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan suatu kebijakan karena dalam pengimplementasiannya semakin kompleks terhadap permasalahan yang dihadapi. (Arrozaaq, 2016) mengatakan bahwa dalam paradigma *governance*, terdapat tiga aktor yang berperan, yaitu pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil. Pemerintah mulai melibatkan aktor nonpemerintah seperti swasta dan masyarakat dalam program pembangunan. Kapasitas dari ketiga aktor tersebut sangat dibutuhkan agar dapat saling melengkapi kapasitas dari aktor lain.

2. Collaborative Governance

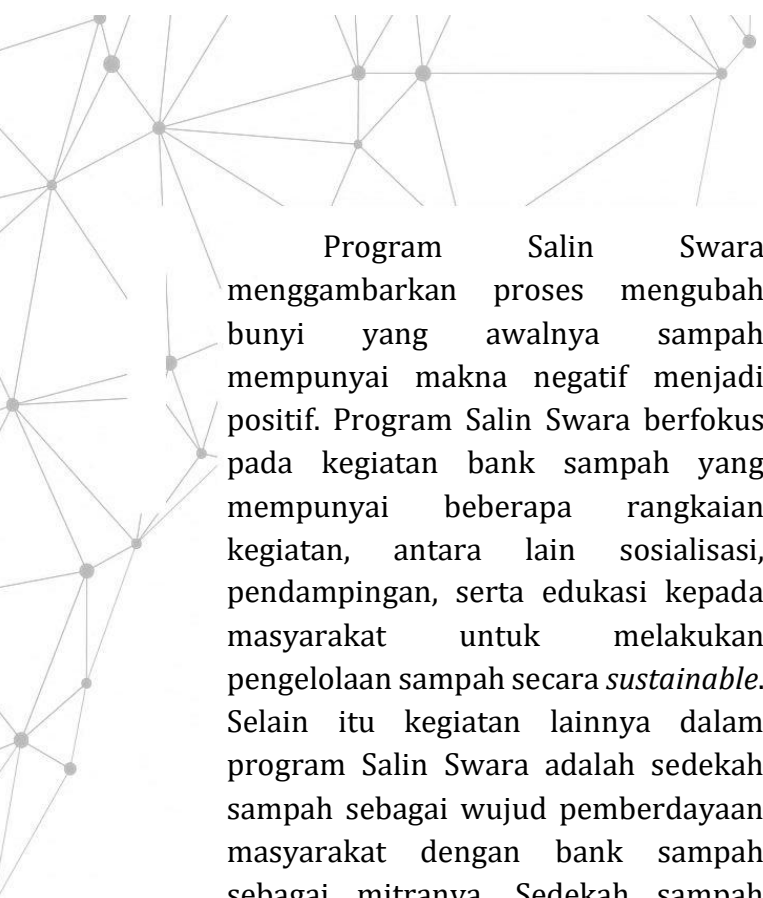
Menurut Cahya (2021) *collaborative governance* timbul akibat adanya inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk melakukan kerjasama dan koordinasi untuk menangani permasalahan yang dihadapi publik. Emerson dan Nabatchi (2015) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pelibatan semua pihak di seluruh batas badan publik, baik itu pada tingkat pemerintahan atau publik, swasta maupun dalam lingkup sipil dalam proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen, untuk

melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses kerjasama antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, sektor bisnis (swasta) dan masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan tata kelola pemerintahan secara umum.

Menurut Ansel dan Gash dalam Astuti (2020) terdapat empat variabel dalam *collaborative governance* yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Kondisi awal adalah tahapan awal dalam menerapkan proses kolaborasi yang terdiri dari tiga indikator penting yang meliputi ketidakseimbangan sumber daya, sejarah masa lalu, dan bentuk dorongan dan kendala dalam keterlibatan dalam kolaborasi. Yang kedua adalah desain institusional berkaitan dengan standar dan aturan-aturan dasar yang diperlukan dan digunakan dalam berkolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Yang ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif agar dalam proses kolaborasi aktor-aktor atau semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi dapat terarah sehingga dalam hal ini pentingnya peran kepemimpinan. Pentingnya peran kepemimpinan fasilitatif diharapkan dapat merangkul, memanfaatkan dan mengikutsertakan seluruh elemen yang berpartisipasi sehingga dalam proses kolaborasi dapat berfungsi dengan baik

dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang keempat adalah proses kolaborasi yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang terdiri dari empat variabel yang saling berkaitan dalam pelaksanaan proses kolaborasi, yaitu dimulai dengan dialog tatap muka. Dialog tatap muka ini dilakukan dengan pertemuan tatap muka antar aktor yang terlibat dan berkomunikasi secara langsung agar tidak ada pihak dalam kolaborasi yang merasa dirugikan karena dalam pertemuan langsung terjadi interaksi antara para aktor untuk membicarakan kepentingan bersama secara langsung, membangun kepercayaan, dalam hal ini membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang tercipta dari hubungan antar aktor terkait. Komitmen pada proses merupakan kewajiban untuk melaksanakan setiap proses agar tujuan yang sudah ditentukan dapat dicapai bersama-sama. Setelah itu, berbagi pemahaman yaitu setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus mempunyai kesamaan pemahaman dari adanya kolaborasi yakni adanya visi misi yang jelas, tujuan yang jelas, pemahaman mengenai masalah dan nilai yang akan dicapai dari kolaborasi. Dan yang terakhir adalah hasil pertengahan yang didapatkan dari proses kolaborasi yang bernilai penting dan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Pengelolaan Sampah Program Salin Swara



Program Salin Suara menggambarkan proses mengubah bunyi yang awalnya sampah mempunyai makna negatif menjadi positif. Program Salin Suara berfokus pada kegiatan bank sampah yang mempunyai beberapa rangkaian kegiatan, antara lain sosialisasi, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara *sustainable*. Selain itu kegiatan lainnya dalam program Salin Suara adalah sedekah sampah sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dengan bank sampah sebagai mitranya. Sedekah sampah diawali dengan penyeter sampah sebelumnya melakukan pemilahan sampah di rumah, selanjutnya hasil pemilahan sampah tersebut disetorkan kepada bank sampah. Perluasan nilai tukar sampah dapat berupa saldo tabungan, emas/logam mulia, premi BPJS, produk tepat guna, dan energi.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash yang terdiri dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses *collaborative governance* pemerintah Kota Bontang dan PT. Badak LNG dalam pengelolaan sampah melalui Program Salin Suara di Bank Sampah Ceria Kota Bontang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dengan melakukan pemilihan

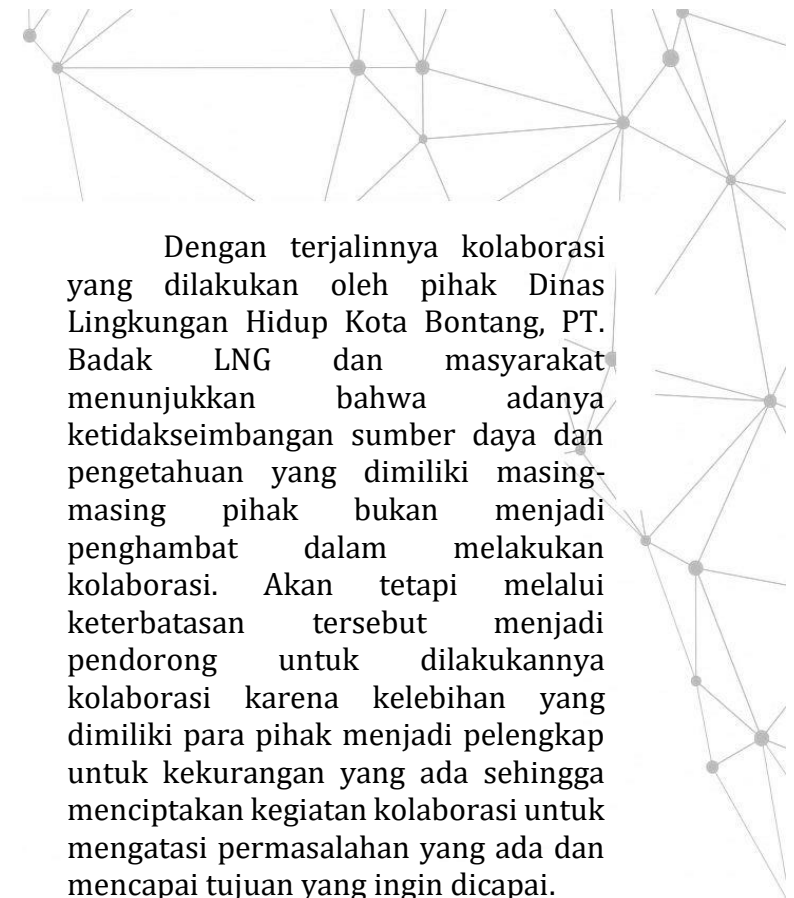
informan melalui metode *purposive sampling* dengan *key* informan yaitu *Facilitator Community Development Officer CSR Departement* PT. Badak LNG, dan yang menjadi informan antara lain, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Ketua Bank Sampah Ceria dan masyarakat yang bekerja di Bank Sampah Ceria. Data sekunder yang digunakan adalah arsip, laporan, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana dalam (Ancha & Prakoso, 2022) dengan empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal

Kondisi awal menjadi tahapan awal dilakukannya kolaborasi. Ansel dan Gash dalam Astuti (2020:76) menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama yang penting dalam kondisi awal terjadinya suatu hubungan kolaborasi antara lain meliputi ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki antar pemangku kepentingan, sejarah kerjasama yang pernah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara stakeholders, serta bentuk dorongan dan kendala dalam keterlibatan dalam kolaborasi.

Kolaborasi melalui program Salin Suara ini terjalin akibat adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang tidak memiliki




sumber daya modal yang cukup kuat untuk mengembangkan Bank Sampah. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan di Kota Bontang yaitu PT. Badak LNG yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan gas alam cair yang walaupun bukan merupakan perusahaan profit, akan tetapi PT. Badak LNG mempunyai komitmen dan modal yang cukup untuk turut dalam upaya penanganan permasalahan sampah di Kota Bontang. Berbeda dengan penelitian Lestari dan Farahnisa (2020) yang berjudul *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa Dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu menunjukkan bahwa pada kondisi awal disebabkan karena adanya keterbatasan truk pengangkut sampah di desa tersebut. Pihak PT. Badak LNG dengan Pemerintah Kota Bontang sebelumnya sudah pernah melakukan kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dapat dilihat adanya TPS3R Kota Bontang sehingga mempermudah para pihak untuk menjalin kolaborasi. Pada kolaborasi ini para *stakeholders* mempunyai kepentingannya masing-masing. pihak swasta yaitu PT. Badak LNG mempunyai kepentingan untuk mempertahankan penghargaan PROPER Emas dengan mewajibkan perusahaan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Pihak pemerintah di dorong oleh adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengembangkan bank sampah yang telah dibangun. Bagi pihak masyarakat didorong oleh rasa kepedulian yang tinggi dan adanya keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan sampah sehingga turut terlibat dalam kolaborasi.

Dengan terjalannya kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, PT. Badak LNG dan masyarakat menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing pihak bukan menjadi penghambat dalam melakukan kolaborasi. Akan tetapi melalui keterbatasan tersebut menjadi pendorong untuk dilakukannya kolaborasi karena kelebihan yang dimiliki para pihak menjadi pelengkap untuk kekurangan yang ada sehingga menciptakan kegiatan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2. Desain Institusional

Desain institusional berkaitan dengan standar dan aturan yang digunakan dalam kolaborasi. Menurut teori Ansell dan Gash dalam Astuti (2020: 77) mengatakan bahwa dalam desain institusional ini menekankan pada aturan yang mendukung dalam pelaksanaan kolaborasi, forum yang dibentuk dalam kolaborasi, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas sehingga nantinya akan terlihat adanya proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi melalui Program Salin Suara ini diatur dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara PT. Badak LNG dengan Bank Sampah Ceria. Dalam *MoU* tersebut terdapat pembagian peran, hak dan kewajiban, serta tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak selama kolaborasi ini berjalan. Akan tetapi di dalam *MoU* tersebut belum mengatur pembagian peran yang mengatur pihak pemerintah dalam kolaborasi. Berbeda



dengan penelitian Safitri, Afifuddin, dan Abidin (2021) yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) menunjukkan pada desain kelembagaan belum tersedia peraturan khusus maupun SOP terkait kolaborasi tersebut dan hanya mengacu pada Undang-Undang yang ada.

Belum dikembangkannya ukuran standar kinerja yang dapat disepakati bersama dalam kolaborasi sehingga berpengaruh pada proses perbaikan kinerja masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Bryson dalam Astuti (2020: 67) mengatakan bahwa dalam kolaborasi setiap pihak harus mempunyai standar kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur perubahan yang telah dicapai, dan dalam mengevaluasi suatu kerjasama.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi indikator yang penting dalam kolaborasi. Ansel dan Gash dalam Noor (2022:56) berpendapat bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menjaga interaksi, kepercayaan antar aktor dan memfasilitasi forum diskusi sehingga para aktor yang terlibat tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi melalui program Salin Swara dilakukan dengan pertemuan dan musyawarah yang difasilitasi oleh pihak PT. Badak LNG. Menurut *MoU* pada pasal 9 mengenai diskusi yang menjelaskan bahwa pelaksanaan diskusi secara berkala paling tidak dilaksanakan sebanyak satu kali dalam satu bulan yang dimana diskusi ini digunakan untuk membahas

setiap perkembangan yang terjadi dalam program Salin Swara dan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang muncul dalam proses kolaborasi. Akan tetapi, berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa forum diskusi tersebut dilaksanakan hanya pada saat-saat tertentu khususnya ketika akan ada perlombaan atau event yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan melibatkan bank sampah. Selain itu, masih terdapat hal yang belum bisa terwujud dalam kepemimpinan fasilitatif ini yaitu penambahan sumber daya manusia dalam hal ini pihak PT. Badak LNG belum bisa memfasilitasi dan untuk pembuatan koperasi pada bank sampah masih belum terdapat kejelasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya peran kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi. Hal yang sama juga terjadi dalam penelitian Harmana dan Wargadinata (2021) yang berjudul *Collaborative Governance* di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kepemimpinan fasilitatif yang tidak seimbang di antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

4. Proses Kolaborasi

Ansell dan Gash dalam Astuti (2020: 77) menjelaskan tahapan dalam proses kolaborasi yang terdiri dari, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil pertengahan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka dilakukan dengan dua arah. Bentuk dialog tatap muka yang dilakukan yaitu dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*), rapat koordinasi, dan dengan datang langsung ke lokasi Bank Sampah Ceria untuk monitoring dan

melakukan dialog. Akan tetapi masih kurangnya intensitas pelaksanaan dialog tatap muka yang hanya dilakukan secara situasional saja ketika akan ada event tertentu. Jika dilihat berdasarkan pendapat Mattessich dan Monsei dalam Astuti (2020: 96) yang mengatakan bahwa keberhasilan dari sebuah kolaborasi dapat dilihat dari komunikasi yang terbuka dan frekuensi komunikasi dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa dialog tatap muka dalam kolaborasi ini belum optimal.

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi melalui program Salin Swara ini tidak terlepas dari terjalannya komunikasi yang baik antara para pihak yang terlibat. Jaringan komunikasi yang terbentuk melalui FGD, rapat, pertemuan dan diskusi. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini juga mempunyai usaha untuk menjaga kepercayaan yang terbangun antar pihak yaitu dengan melakukan transparansi data, responsif, tanggap dengan problematika yang terjadi, saling melakukan komunikasi, terbuka dengan kritik dan saran yang diterima, serta memiliki toleransi yang tinggi. Sebagaimana pendapat Das dan Teng dalam Astuti (2020: 68) bahwa jika tidak terbangun kepercayaan dari para pihak yang berkolaborasi maka dapat mengganggu keberhasilan pencapaian tujuan kolaborasi.

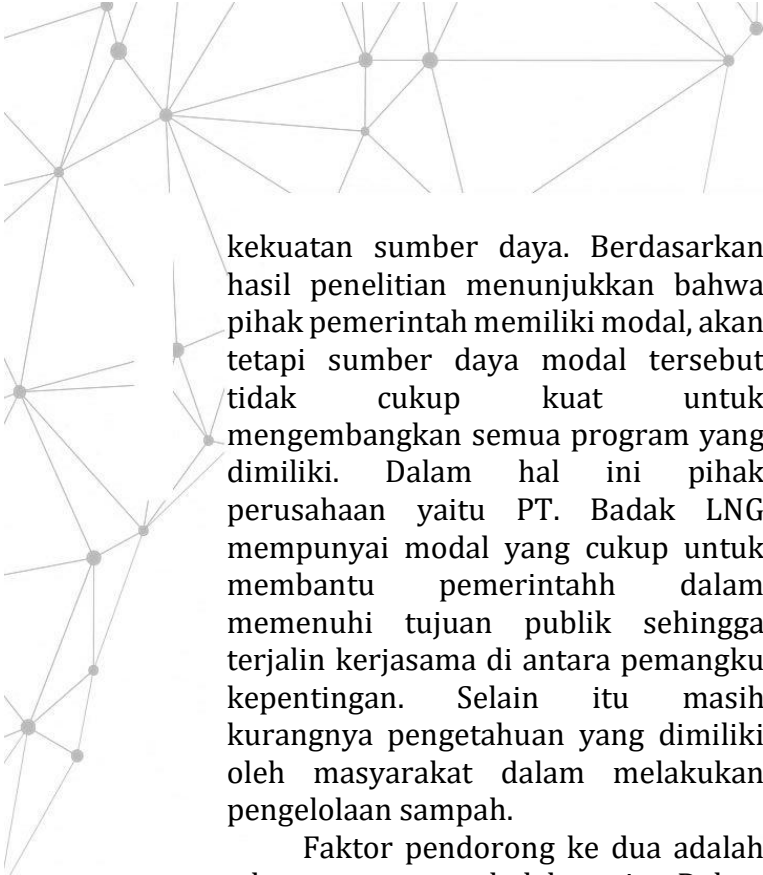
Komitmen dalam proses kolaborasi melalui Program Salin Swara ditunjukkan oleh pihak perusahaan dengan diselenggarakannya pelatihan, sosialisasi serta pendampingan pada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Akan tetapi masih kurangnya komitmen dari masyarakat yang bekerja di bank sampah dikarenakan

tidak ada aturan yang mengatur kewajiban masyarakat untuk bekerja sehingga hal ini juga mempengaruhi keaktifan pada pekerja lain dan mengakibatkan kegiatan bank sampah jarang dilakukan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Meidita Lestari dan Tazkiya Farahnisa (2020) yang berjudul *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa Dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu menunjukkan bahwa komitmen yang dijalankan pada bank sampah kurang baik, yang ditandai dengan jarang dilaksanakannya proses pengumpulan dan pembuatan produk bank sampah. Dalam kolaborasi ini belum timbul rasa ketergantungan di antara para pihak yang terlibat. Menurut Teka (2021) mengatakan bahwa kolaborasi akan mudah dipertahankan dan dibangun terus-menerus apabila rasa saling ketergantungan antar aktor sudah tercipta. Dalam proses kolaborasi ini pihak PT. Badak LNG, Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Ceria masih mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam kolaborasi.

Beberapa hasil sementara dari berjalannya kolaborasi ini, yaitu sudah terdapat peningkatan nasabah di bank sampah sebanyak 152 orang, menambah pengetahuan masyarakat mengenai pemilahan sampah yang baik, Hasil sementara lainnya yakni berkurangnya sampah anorganik yang dibuang ke TPA, tercapainya pengurangan sampah sebesar 26%, adanya fasilitas mesin pyrolisis yang digunakan di TPA, serta dapat membantu perekonomian masyarakat

Faktor Pendorong

Faktor pendorong pertama dalam kolaborasi ini adalah adanya perbedaan



kekuatan sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemerintah memiliki modal, akan tetapi sumber daya modal tersebut tidak cukup kuat untuk mengembangkan semua program yang dimiliki. Dalam hal ini pihak perusahaan yaitu PT. Badak LNG mempunyai modal yang cukup untuk membantu pemerintah dalam memenuhi tujuan publik sehingga terjalin kerjasama di antara pemangku kepentingan. Selain itu masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah.

Faktor pendorong ke dua adalah adanya aturan kolaborasi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada BAB V Pasal 74 dengan jelas mewajibkan pihak perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah yang digunakan pemerintah dalam melakukan kolaborasi karena di dalam peraturan tersebut mengatur semua pihak tanpa terkecuali untuk ikut terlibat dalam menangani permasalahan sampah.

Faktor pendorong ketiga adalah pencapaian hasil sementara. Hasil sementara yang telah tercapai antara lain adanya peningkatan jumlah nasabah pada Bank Sampah Ceria, peningkatan wawasan bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang baik, peningkatan aspek ekonomi masyarakat yang berasal dari pemasukan penjualan sampah, berkurangnya tumpukan sampah anorganik di TPA Bontang Lestari sehingga pengurangan sampah 26% dapat tercapai, serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.

Sebagaimana pendapat Ansell dan Gash dalam Astuti (2020: 79) dari terciptanya hasil sementara ini dapat menjadi dorongan bagi para pihak yang terlibat untuk dapat menjaga rasa percaya dan membangun komitmen di antara para stakeholders.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat pertama adalah tidak adanya standar kinerja. hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam kolaborasi melalui Program Salin Suara ini belum memiliki standar kinerja. Dengan belum adanya standar kinerja bersama, menyebabkan pekerjaan dan aktivitas di dalam kolaborasi ini tidak memiliki tolok ukur yang dapat dijadikan ukuran dalam melakukan penilaian dan evaluasi apakah para pihak di setiap tahapan dan aktivitas kolaborasi sudah baik atau belum. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya ketidaksepahaman antarpihak terkait target dan tujuan yang ingin dicapai dalam kolaborasi. sebagaimana pendapat Guarneros-Meza dalam Astuti (2020:67) yang mengatakan bahwa dengan tidak adanya ukuran kinerja mengakibatkan perbedaan interpretasi mengenai hasil yang akan dikejar dan bagaimana mengukurnya.

Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya sumber daya manusia khususnya yang bekerja di Bank Sampah Ceria. Masyarakat yang bekerja di bank sampah yang hanya berjumlah 12 orang tidak sebanding dengan jumlah nasabah dan jumlah sampah yang ditabung di bank sampah sehingga mengakibatkan adanya tumpukan sampah-sampah yang belum terpilah. DeSeve dalam Noor (2022) yang menyatakan bahwa salah satu indikator penting dalam mencapai keberhasilan

dalam kolaborasi adalah adanya sumber daya manusia yang memadai dalam berjalannya kolaborasi untuk mencapai tujuan.

Faktor penghambat ketiga adalah adanya ego sektoral di antara pemangku kepentingan. Timbulnya ego sektoral dalam kolaborasi diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat dan kurangnya koordinasi antar pihak. Ego sektoral menjadi hambatan yang dialami dalam kolaborasi karena menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan pendapat dari masing-masing pihak

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah melalui Program Salin Swara di Kota Bontang menunjukkan bahwa; a) Pada kondisi awal kolaborasi didorong akibat adanya keterbatasan sumber daya dan pengetahuan dari setiap pihak, kedua belah pihak telah membentuk beberapa sejarah kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya, adanya kepentingan dari masing-masing pihak mendorong partisipasi keterlibatan dalam kolaborasi; b) Pada desain institusional masih ditemukan kekurangan dalam hal standar kinerja yang belum dikembangkan oleh setiap pihak yang terlibat di dalam kolaborasi; c) Pada kepemimpinan fasilitatif telah di fasilitasi forum diskusi antar pihak, akan tetapi pelaksanaan pertemuan masih bersifat situasional dan masih terdapat hal yang belum mampu difasilitasi oleh para pihak; d) Pada proses kolaborasi masih ditemukan kekurangan seperti masih kurangnya frekuensi pelaksanaan dialog tatap muka, kurangnya komitmen dari pihak

masyarakat, serta masih terdapat perbedaan pemahaman di antara para pihak yang terlibat di dalam kolaborasi mengenai tujuan dari kolaborasi. Faktor pendorong meliputi adanya perbedaan kekuatan sumber daya, adanya aturan kolaborasi, pencapaian hasil sementara. Faktor penghambat meliputi tidak adanya standar kinerja, keterbatasan sumber daya manusia, adanya ego sektoral di antara pemangku kepentingan.

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti usulkan antara lain; a) Terkait dengan standar kinerja sebaiknya para pihak yang terlibat di dalam kolaborasi ini dapat mengembangkan atau membuat standar kinerja yang secara jelas mengatur tugas pokok dan fungsi, rencana kerja dan target, serta aturan kerja yang dapat disepakati bersama; b) Melakukan penambahan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Ceria. Hal ini berguna untuk mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan maksimal; c) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan semua pihak yang terlibat di dalam kolaborasi baik pihak perusahaan, pihak Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat sehingga semua pihak yang terlibat dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang sama mengenai tujuan dari Program Salin Swara.

DAFTAR PUSTAKA

Ancha, A., & Prakoso, C. T. (2022). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten

- Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, A. R. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang. Universitas Diponegoro Press.
- Badak LNG. 2021. Launching Salin Swara. https://www.badaklng.com/id/index.php?option=com_content&view=article&id=209:launching-salin-swara&catid=80&Itemid=437. (diakses pada 21 Maret 2022).
- Cahya, N. (2021). Proses *Collaborative Governance* Dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) Di Jalan Tol Kota Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 92.
- Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, & Ismail Nurdin. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 247–260. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.430>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix*. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Lestari, R. M., & Farahnisa, T. (2020). *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan Bank Sampah di Desa Kramatwatu. *Ijd-Demos*, 2(3), 225–239. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.57>
- Marojahan, R. (2015). Hubungan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sampah Dengan Perilaku Mengelola Sampah Rumah Tangga di RT 02 dan RT 03 Kampung Garapan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. *Jurnal Forum Ilmiah* Volume, 12(1), 33–44.
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi dan Antun Mardiyanta. (2022). *Collaborative Governance* Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Surabaya. Bildung.
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Safitri, S. D., Afifuddin, Abidin, A. Z. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo 'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) Haryono No . 193 , Dinoyo , Kec . Lowokwaru , Kota Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan. 15(5), 52–57.

Sili Teka, S. (2021). Urgensi Desain *Collaborative Governance* dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua) *The Urgency of Collaborative Governance Design in Elections and Pilkada (Case Study of. Adhyasta Pemilu, 4(1), 1-27.*

Sipsn.menlhk.go.id. (2019-2022). Timbulan sampah Provinsi

Kalimantan Timur Kota Bontang. <https://sipsn.menlhk.go.id/> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Wijaya, H., Nurasa, H., Susanti, E. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota cimahi (studi kasus di wilayah pelayanan sampah leuwigajah). 13(2), 341-347.